

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan merupakan kunci bagi segala hal bagi masyarakat desa kebanyakan, pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi. Sedangkan pembangunan masyarakat desa merupakan proses di mana masyarakat desa mau menerima usaha-usaha pembaharuan dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka. Masyarakat desa pada umumnya hidup dalam situasi kesederhanaan dan kekurangan, pada hal mereka merupakan mayoritas dari penduduk suatu Negara. Pembangunan masyarakat desa cukup sulit, disamping kurang modal tingkat pendidikan yang rendah kurangnya tenaga pembimbing ke arah pembangunan.

Dalam rangka peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah. Sebagai upaya untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu.

Perencanaan sangat diperlukan dan berperan cukup vital dalam pelaksanaan pembangunan daerah di segala bidang. Perencanaan adalah suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Pembangunan daerah tidak akan berjalan optimal tanpa perencanaan yang tepat, terarah, efektif dan menyeluruh. Untuk melaksanakan tugas penting tersebut diperlukan suatu struktur organisasi yang kompeten agar kegiatan perencanaan pembangunan daerah bisa berjalan optimal.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bentuk berdasarkan pertimbangan :

- Bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.
- Bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah, diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sragen berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Bappeda, Keputusan Menteri dalam Negeri RI no. 185 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Tingkat I dan Bappeda Tingkat II, maka berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sragen tanggal 1 April 1981 nomor: 134/06/36 tahun 1981 dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Dati II.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut bidang Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen, serta berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Maret 1987 nomor: 061.1/2843/Sj jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 April 1987 nomor: 061.1/9851, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Pembentukan Susunan organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Dati II Sragen.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 185 tahun 1980 dipandang perlu menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Dati II Sragen.

Kemudian pendirian Bappeda diperkuat berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan ditegaskan dengan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menjelaskan bahwa Bappeda merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang menyelenggarakan fungsi dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan serta pembinaan. Dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja, kemudian peraturan tersebut diperbarui dengan Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2009.

BAPPEDA Kabupaten Sragen yang berada di dalam lingkungan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen di Jl.Raya Sukowati No.255 Sragen, terdiri dari empat bidang yaitu Bidang Ekonomi, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah dan Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi yang masing-masing terbagi menjadi beberapa sub bidang yang lebih spesifik agar kegiatan yang dilaksanakan lebih terfokus.

Sistem informasi merupakan suatu kebutuhan bagi seluruh instansi, sebagaimana diketahui pertumbuhan pemakaian komputer di Indonesia telah berkembang makin pesat dan ditunjang dengan tersedianya program aplikasi yang beraneka ragam sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Namun setiap instansi pasti memiliki alur informasi yang berbeda-beda sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani oleh masing-masing instansi sehingga diperlukan system informasi pengolahan data yang sesuai dengan kebutuhan dan alur informasi instansi tersebut.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses usulan rencana pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Sragen melakukan inovasi berupa aplikasi sistem usulan rencana pembangunan daerah yang disingkat SURPD. Melalui aplikasi tersebut format usulan dan pelaporan usulan rencana pembangunan daerah seluruh SKPD seragam. Dengan demikian diharapkan mendorong terwujudnya penyusunan usulan rencana pembangunan daerah yang lebih terstruktur, rapi dan efektif, mempersingkat waktu yang diperlukan untuk

perbaikan penyusunan dan meningkatkan kualitas pengendalian dan pengawasan usulan rencana pembangunan daerah. Pada akhirnya, tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya integrasi proses perencanaan kegiatan dan anggaran mulai dari proses Musrenbang, Penyusunan Renja SKPD, RKPD hingga KUA-PPAS secara efektif dan efisien.

Sistem tersebut diakses secara online melalui Bappeda sebagai admin, sedangkan user para setiap SKPD dan Kecamatan dengan akses username dan password yang berbeda-beda. Usulan dimulai dari Musrenbang Desa yang telah dikirim ke Kecamatan dan di bahas di Musrenbang Kecamatan. Kemudian Kecamatan mengentri usulan ke aplikasi SURPD Kab. Sragen. Kemudian di terima SKPD terkait untuk selanjutnya SKPD memilih usulan Musrenbang Kecamatan yang akan dijadikan prioritas atau belum prioritas. Kemudian SKPD mengentri Renja ( rencana kerja ) SKPD.

Berikut data pengguna Sistem Usulan Rencana Pembangunan Daerah (SURP) :

NO	SKPD
1	DPU (Dinas Pekerjaan Umum)
2	Sekretariat DPRD
3	Bakesbang Pol ( Badan Kesatuan dan Politik)
4	BKD (Badan Kepegawaian Daerah)
5	BPTPM (Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal)
6	Badiklat (Badan Pendidikan dan Latihan)
7	Litbang (Penelitian dan Pengembangan)
8	Dispenduk & Capil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

9	PDE (Pusat Data Elektronik)
10	Perpustakaan Daerah
11	Kantor Arsip Dokumen
12	Dinas Pendidikan
13	Dinas Kesehatan
14	Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)
15	BKBPMMD (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat desa)
16	Bagian Kesejahteraan Rakyat
17	PP&PA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
18	UPTPK (Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan)
19	BPUMD (Badan Pemberdayaan Milik Daerah)
20	BAPELUH (Badan Pelaksana Penyuluh)
21	Dishutbun (Dinas Kehutanan dan Perkebunan)
22	Disnakan (Dinas Peternakan dan Perikanan)
23	Dinas Perdagangan
24	Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM
25	BLH (Badan Lingkungan Hidup)
26	Inspektorat
27	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

28	DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)
29	Dinas Sosial
30	Dinas Pertanian
31	Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga
32	Dinas Perencana Pembangunan Daerah

No	KECAMATAN
1	Gemolong
2	Gesi
3	Gondang
4	Jenar
5	Kalijambe
6	Karangmalang
7	Kedawung
8	Masaran
9	Miri
10	Mondokan
11	Ngrampal
12	Plupuh

13	Sambirejo
14	Sambungmacan
15	Sragen
16	Sidoharjo
17	Sukodono
18	Sumberlawang
19	Tangen
20	Tanon

Tabel 1.1 Pengguna Aplikasi SURPD

Sumber : *Subag PRP Bappeda Sragen, 2015*

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka penulis bermaksud membuat tugas akhir dengan judul “Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah di BAPPEDA (Badan Perencana Pembangunan Daerah) Kabupaten Sragen”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas. Permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bagaimana sistem informasi perencanaan pembangunan daerah di BAPPEDA (Badan Perencana Pembangunan Daerah) Sragen ?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas. Tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir sebagai berikut :

- Tujuan Operasional : Untuk mengetahui sistem informasi perencanaan pembangunan daerah di BAPPEDA (Badan Perencana Pembangunan Daerah) Kabupaten Sragen.
- Tujuan Fungsional : Pengamatan ini bertujuan agar hasilnya dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang berkepentingan, bagi para pembaca maupun Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen sendiri.
- Tujuan Individual : Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh sebutan Ahli Madya pada Program Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

#### **D. Manfaat Penulisan**

- Menambah pengetahuan akan pentingnya sistem informasi dalam suatu instansi pemerintahan, khususnya Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai bekal agar kelak dapat menerapkan cara yang lebih baik dalam penerapan sistem informasinya



